

SKRIPSI

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA DI DESA GOLO BILAS
KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH :

CICI PARAMIDA

218130106

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA DI DESA GOLO BILAS
KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Disusun dan diajukan oleh :

CICI PARAMIDA

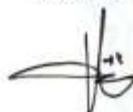
218130106

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang Skripsi

Mataram, 04 Februari 2022

Dosen Pembimbing I



Drs. Amil, M.M
NIDN. 0831126204

Dosen Pembimbing II



Azwar Subandi, S.IP., M.H
NIDN.0818018101

**Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**



Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA DI DESA GOLO BILAS
KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Disusun dan diajukan oleh :

CICI PARAMIDA

218130106

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang Skripsi
Mataram, 04 Februari 2022

Dosen Pembimbing I

Drs. Amil, M.M
NIDN. 0831126204

Dosen Pembimbing II

Azwar Subandi, S.IP., M.H
NIDN.0818018101

**Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, menyatakan bahwa:

Nama : Cici Paramida

Nim : 210130106

Alamat : Jl. Kali Breyok, Kecamatan Mataram, Kota Mataram

Memang benar skripsi yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Musyawarah Pembangunan Desa di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dipublikasikan orang lain, kecuali arahan dan bimbingan. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terhadap penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dengan norma yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 04 Februari 2022



Cici Paramida
210130106



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CICI PARAMIDA
NIM : 218130106
Tempat/Tgl Lahir : kenari 19 Juli 2001
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sa. Fisiol
No. Hp : 085233021122
Email : cici-jbaya89@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERAN BAGAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MUSTAMARAH
PEMBANGUNAN DESA DI DESA GULO BILAS, KECAMATAN KOMODO KAB-PATEN
NANGGARA BAPAT

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

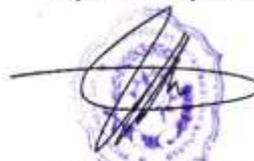
Mataram, 23 Februari.....2022

Penulis



Cici Paramida
NIM. 218130106

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CICI PARAMIDA
NIM : 218130106
Tempat/Tgl Lahir : Kerasi, 17 Juli 2001
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : cici.dibawa99@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PEKAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MUSYAWARAH PEM-
BANGUNAN DESA DI DESA SOLOBILAS KECAMATAN KOMODO KABUPATEN
MANGGARAI BARAT

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

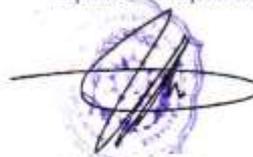
Mataram, 23 Februari2022

Penulis



CICI Paramida
NIM. 218130106

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO

JANGAN PERNA MENYIA-NYIAKAN WAKTU
DAN SABAR ADALAH KUNCI KESUKSESAN

(Cici Paramida)

MAHKOTA SESEORANG ADALAH AKALNYA, DERAJAT
SESEORANG ADALAH AGAMANYA, SEDANGKAN
KEHORMATAN SESEORANG ADALAH BUDI PEKERTINYA.

(Umar Bin Khatab)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan untuk :

1. Kepada Kedua Orang Tua Ayahanda Tercinta Basir, Ibunda Tercinta Nurhayati yang selalu memberikan Do'a, dukungan dan menjadi Penyemangat terhebat selama peneliti menyusun Karya ilmiah ini (Skripsi) dari awal sampai selesai.
2. Kepada teman paling dekat Putry dan dita tersayang terimakasih atas dukungan kalian dan motivasi dari awal sampai akhir perjuangan saya dalam menyusun karya ilmiah ini (Skripsi) sampai selesai dan tepat waktu.
3. Kepada Teman-teman kos yang selalu memberikan motivasi semangat dalam proses Perjalanan Akademik Peneliti sampai Pada Penyusunan Karya Ilmiah ini (Skripsi) dari awal sampai selesai.
4. Kepada Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Pelajar Komodo Boleng Manggarai Barat-Mataram (IMPKBM) yang telah memberi dukungan dan motivasi menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) ini.
5. Kepada Muhammad Darmanto tercinta yang selalu sabar dalam membantu dan memberikan Motivasi, terimakasih banyak untuk iberkat dirimu juga sehingga Karya Ilmiah Ini (Skripsi) dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

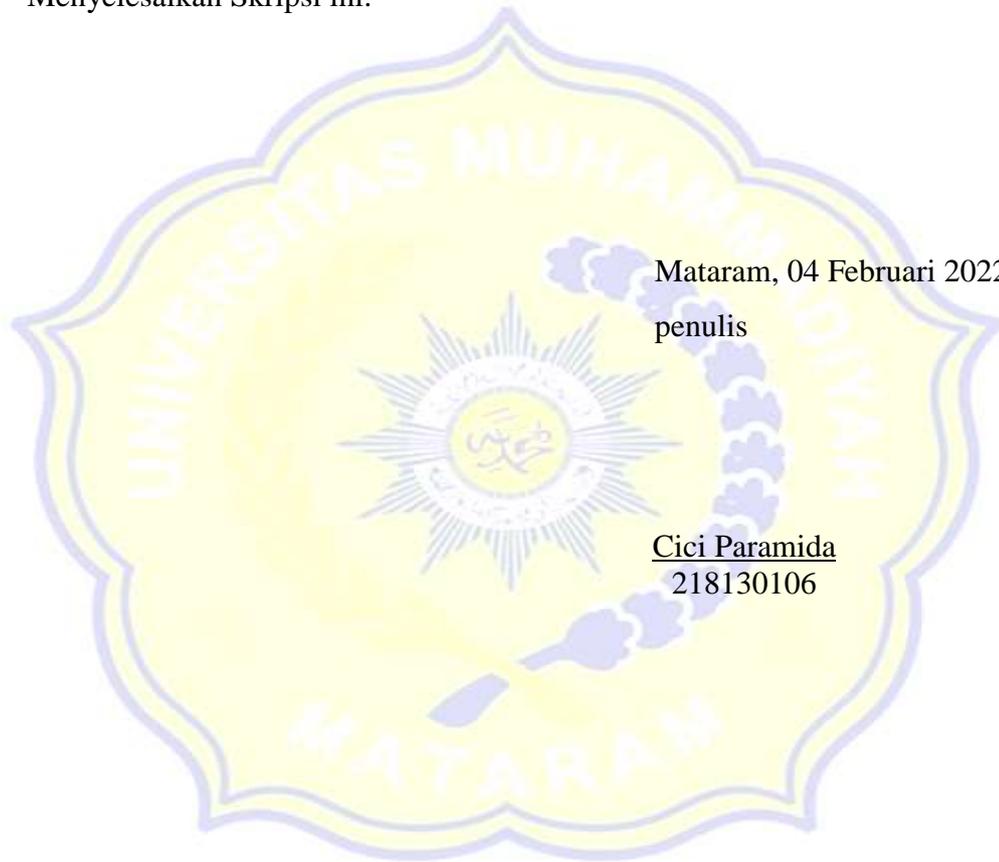
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “ **Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah Pembangunan Desa di Desa Golo Bilas Kecamatan Komod Kabupaten Manggarai Barat**” Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh dan suri teladan yang baik bagi kehidupan manusia di seluruh dunia.

Skripsi ini sebagai salahsatu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana Strata satu (S1). Di Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa Bantuan dari berbagai pihak , karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H Arsyad Abdul Gani. M.pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M. SI. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S. IP.,M.IP. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs . Amil., MM Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dengan sabar dan teliti dalam menyelesaikan Skripsi.
5. Bapak Azwar Subandi,S.IP., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Kepada kedua Orang Tua yang selalu memberikan Do'a dan Motivasi Serta dukungan bagi penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepada Teman-Teman Dekat dan Rekan-Rekan Mahasiswa dan semua pihak yang telah memberikan dorongan Do'a Motivasi sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi ini.



Mataram, 04 Februari 2022
penulis

Cici Paramida
218130106

ABSTRAK

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA DI DESA GOLOBILAS KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Cici Paramida

218130106

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawarata Desa (BPD) dalam Musyawarah Pembangunan Desa di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. dengan Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Sejauh manakan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Musyawarah Pembangunan Desa di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat? : serta Faktor apa sajakah Penghambat dan Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Musyawarah Pembangunan Desa di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat?

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitataif Deskriptif yang menganalisa fenomena-fenomena yang dialami atau dilakukan oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dari subjek penelitian. Jadi data penelitian di dapatkan dari Dokumentasi, wawancara yang di lakukan oleh peneliti kepada Pemerintah Desa, Masyarakat, sekretasis sekaligus anggota BPD dan Ketua BPD, kepala Desa Golo bilas kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat .

Hasil penelitian tersebut menunjukkan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang cukup efektif. Kemudian kerjasama yang di bangun Oleh Pemerintah Desa atau membangun mitra bersama BPD Sudah cukup Optimal. Namun yang menjadi salahsatu kendala yang dihadapi adalah Rendahnya Tingkat Pendidikan Mayarakat, hal ini menjadi salahsatu faktor penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam menjalankan Fungsinya karena keterbatasan ruang gerak dalam menyebarkan pikiran atau aspirasi untuk kemajuan Desa.

Kata Kunci : Peran, Pembangunan.

ABSTRACT



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teori	10
2.2.1 Peran.....	10
2.2.2 Ruang Lingkup BPD	12
2.2.3 Desa.....	15
2.2.4 Pembangunan	20
2.3 Kerangka Berfikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	24

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	24
3.3 Teknik Pemilihan Informan dan Responden.....	25
3.4 Jenis dan Sumber Data	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.6 Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum	29
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Golo Bilas	29
4.1.2 Visi-Misi	29
4.1.3 Profil Desa Golo Bilas	30
4.1.4 Struktur Organisasi.....	39
4.2 Hasil Pembahasan	42
4.2.1 Peran BPD dalam Musyawarah Pembangunan Desa di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat	42
4.2.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Peran BPD dalam Musyawarah Pembangunan Desa di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat	46
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 4.1 Tata Guna Tanah	32
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun.....	32
Tabel 4.3 Lembaga Pendidikan formal	33
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis pekerjaan.....	34
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	35
Tabel 4.6 Aspek Kesehatan.....	37
Tabel 4.7 Agama (Berdasarkan Pemeluk)	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Berfikir	23
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Golo Bilas	39
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 Pulau. Ribuan Pulau menjadikan Indonesia memiliki kekayaan yang berlimpah, salah satunya adalah Etnis dimana hampir setiap pulau di Indonesia memiliki tradisinya sendiri, memiliki kuliner khasnya sendiri, Rumah Adat sendiri serta desain-desain etnisnya sendiri. Sesuai letak geografisnya, Indonesia berada di antara benua asia dan Australia dan di antara lautan Hindia serta pasifik, sehingga daerah Indonesia berada pada posisi silang, tentunya hal ini mempunyai arti penting berkaitan dengan iklim ataupun Perekonomian. Ibu kota Negara Indonesia adalah Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Adapun Semboyan Negara indonesia adalah “Bhineka Tunggal Ika” yang bermakna meskipun berbeda-beda namun pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan, Semboyan ini di pakai sebagai ilustrasi persatuan serta kesatuan Bangsa serta NKRI.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang dimaksud Negara hukum merupakan Negara yang di dalamnya ada berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa serta memiliki hukuman tegas jika dilanggar. Maka, arti Indonesia sebagai Negara hukum merupakan segala aspek kehidupan di daerah NKRI harus di dasarkan pada aturan serta segala produk perundang-undangan dan turunannya yg berlaku di wilayah NKRI. Negara hukum sendiri berdiri diatas aturan yang

menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk Indonesia, Negara hukum yang didasarkan pada Nilai-nilai Pancasila adalah pandangan hidup bangsa serta sumber dari segala sumber hukum. Adapun produk turunan UU dapat berupa Perpres, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Perda, Pergub, serta berbagai peraturan lainnya. Hukum Indonesia wajib di landasi dengan semangat menegakkan Nilai, Ketuhanan, kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan sebagaimana terkandung pada Pancasila.

Manggarai Barat adalah salahsatu Kabupaten yang terletak di wilayah bagian barat Provinsi NTT. Kabupaten Manggarai Barat adalah hasil pemekaran dari kabupaten manggarai berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Barat. Ibu kota Manggarai Barat adalah Labuan Bajo yang saat ini adalah salah satu dari lima Destinasi Super Prioritas yang sedang di kembangkan di Indonesia. Labuan Bajo terkenal akan kekayaan pariwisatanya seperti Pulau Padar, Wae Rebo, Pantai pink, Pulau Kelor, Bukit Cinta dan tempat Pariwisata lainnya .

Berdasarkan PERDA Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang BPD pada Pasal 3 Tujuan Pembentukan BPD yaitu sebagai berikut:

1. Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2. Mendorong BPD agar Mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik di Desa.

Pada hal ini pelaksanaan pemerintahan Desa, BPD memegang peranan yang sangat penting sebab merupakan wadah penampung aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan keberhasilan Desa, dapat dipandang dari seberapa efektifnya peran serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya.

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), jika seorang melaksanakan hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu fungsi (Soerjono soekanto 2002:243), maka dapat dijabarkan, status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang atau kelompok diharapkan menjalankan kewajibannya yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya dengan norma-norma kebudayaan. Seseorang dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam hidup bermasyarakat.

Kecamatan Komodo adalah salah satu dari 12 kecamatan yang ada di kabupaten manggarai NTT yang memiliki 17 jumlah Desa dan memiliki 2 kelurahan yaitu kelurahan Labuan bajo dan kelurahan Wae kelambu. Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 berbunyi pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam hal ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menentukan perda yang diharapkan dalam mendukung program-program pemerintah daerah.

Desa Golo Bilas termasuk dalam 17 desa yang terdapat di kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai barat NTT. Desa Golo Bilas memiliki luas wilayah 2.116 km dengan jumlah penduduk di tahun 2020 berjumlah 4.622 jiwa. Pemerintah Desa yg termuat dalam UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yg mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat, hak asal-usul serta hak tradisional yang di akui serta di hormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Maka dapat jabarkan semua yang berkaitan dengan desa itu atas kesepakatan masyarakat desa, begitu pun dengan peraturan desa dimana harus ada kesepakatan dari masyarakat setempat agar dalam pelaksanaannya tidak lari jauh dari norma yang dianut oleh masyarakat didesa tersebut seperti yang termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Adapun Permasalahan Dari segi pembangunan Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dalam menciptakan Perubahan adalah sebagai berikut:

1. Kurang berfungsinya BPD Desa Golo Bilas dalam menanggapi aspirasi masyarakat.
2. Belum maksimal nya pengawasan dari BPD terhadap kebijakan pemerintahan desa.
3. BPD masih belum memahami secara penuh tentang peran serta tupoksinya terhadap pemerintahan Desa.

4. Aspirasi dari masyarakat kurang di tampung dan di salurkan ke pemerintah Desa.

Berdasarkan Point-point di atas Dapat di simpulkan bahwa keterlibatan BPD masih mempunyai kekurangan atau belum maksimal sehingga efektifitas pada pembangunan Desa bisa menurunkan kestabilan program pencapaian visi-misi yg sudah di rancang oleh pemerintah Desa Golo Bilas.

Berdasarkan permasalahan di atas yang peneliti angkat berdasarkan hasil observasi wawancara, Dokumentasi, melihat dan mendengar langsung di lapangan maka atas dasar itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Musyawarah Pembangunan Desa di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Sejauh manakah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Musyawarah Pembangunan Desa di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat?
2. Faktor apa sajakah penghambat dan pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Musyawarah Pembangunan Desa di

Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Sejauh manakah Peran (BPD) dalam Musyawarah Pembangunan Desa di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
2. Untuk Mengetahui Faktor apa sajakah Penghambat dan Pendukung Peran (BPD) dalam Musyawarah Pembangunan Desa di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Untuk menambah khasanah dan perkembangan kajian ilmu tentang pemerintah, khususnya dalam kajian tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

2. Aspek Praktis

Diharapkan hasil rencana penelitian ini dapat memberikan sumbangsi baik itu Peneliti, Instansi, dan Akademis.

a. Peneliti

Hasil Penelitian ini dapat di jadikan tambahan refrensi lanjutan bagi peneliti dalam melakukan penelitian terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Musyawarah Pembangunan

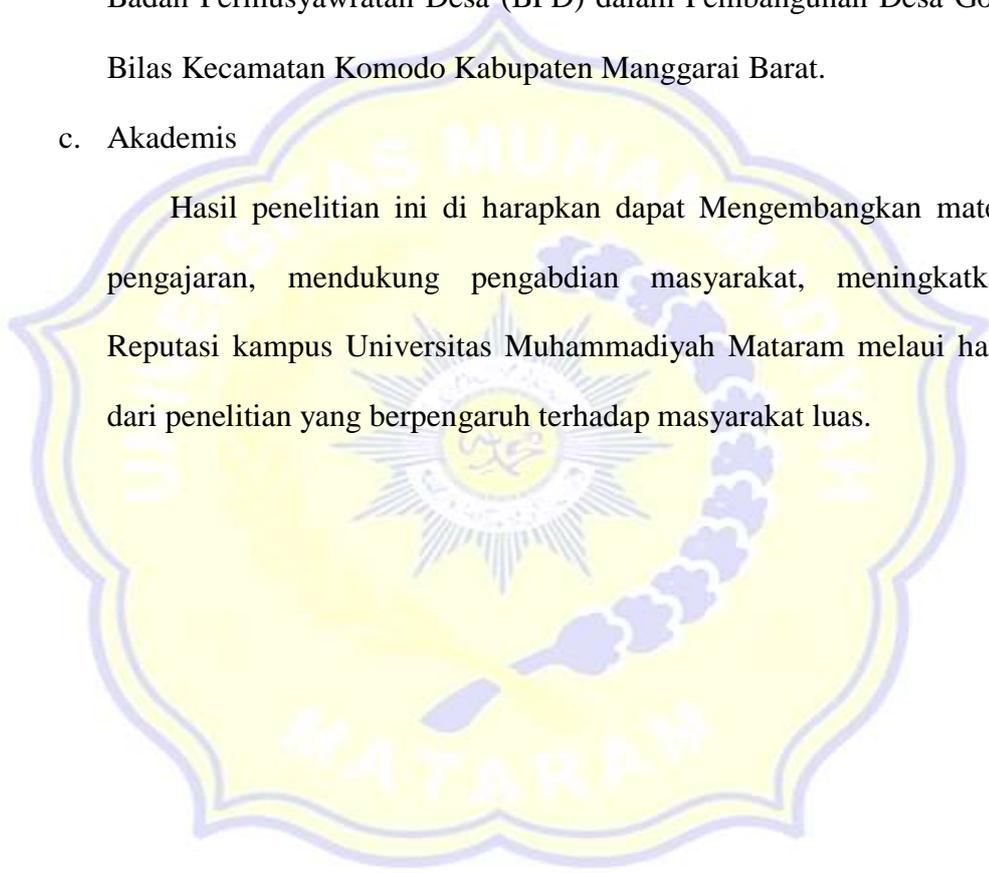
Desa di Desa Golo Billas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

b. Instansi

Hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan masukan bagi Desa Golo Bilas dalam merumuskan kebijakan untuk memperbaiki Peran Badan Permusyawratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

c. Akademis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat Mengembangkan materi pengajaran, mendukung pengabdian masyarakat, meningkatkan Reputasi kampus Universitas Muhammadiyah Mataram melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Putu Wijaya shaputra (2014) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa Pura Sajau hilir kecamatan Palas Timur Kabupaten Bulungan.	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BPD dalam pembangunan pedesaan kurang optimal, dan kurangnya sosialisasi tentang peran BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, prioritas program ini adalah pembangunan yang tidak tepat dan BPD tidak berkomitmen untuk pembangunan desa.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Perbedaannya berada pada objek penelitian yang dimana penelitian ini di laksanakan didesa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana peran BPD dalam musyawarah pembangunan desa
2.	Siska Dewi Agustin (2016) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses sinergitas dengan kepala desa untuk membangun pemerintahan yang demokratis di desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo	Hasil penelitian ini bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui peran badan Permusyawaratan Desa (BPD) daalam upaya membangun pemerintahan yang demokratis di Desa Matekan kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pola hubungan kepala desa dan BPD dalam proses sinergitas untuk membangun pemerintahan yang demokratis di desa matekan	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaannya ada pada objek penellitiannya, yaitu penelitian ini berobjek pada desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat fokus penelitiannya adalah bagaimana peran BPD dalam musyawarahPembangunan desa

		Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo		
3.	Hartati (2010) Analisis pelaksanaan fungsi badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.	Hasil penelitian ini lebih mendapatkan banyak faktor yang terdapat pada lapangan dari berbagai sector dalam desa tersebut semua di rampung melalui tabel tabel yang terdapat pada pembahasannya. Memperkuat legitimasi, adat istiadat, pengawasan serta hubungan komonikasi.	Persamaan nya lebih ke dalam menjelaskan fungsi BPD dalam menjalankan tugasnya dan sama-sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaanya terletak pada objek penellitiannya. penelitan ini berobjek pada desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat focus penelitiannya adalah bagaimana peran BPD Dalam Musyawarah pembangunan desa
4.	Estwe Juita Punu,(2014) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wiau-Lapi Minahasa Selatan.	Hasil penelitian pada tahap pengawasan BPD terhadap setiap penyelenggaraan Pemerintahan desa Wiau-Lapi dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dan meningkatkan pembangunan desa yang efektif.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pengawasan BPD	Perbedaanya terdapat pada penelitian lokasi yang berbeda.
5.	Noviar Satriadi, (2016) Pengaruh BPD dalam pembentukan peraturan desa dengan keluarnya UU NO 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (studi di kecamatan praya baarat)	Menunjukkan peran BPD sesuai dengan temuan dalam penelitian belum mampu menjalankan peran dan fungsinya seacara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama berkaitan dengan fungsi legitimasi desa.	Persamaan dalam penlitian ini sama-sama membahas tentang peraturan daerah UU NO.32 Tahun 2004	Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada lokasi enelitiannya, Penelitan ini berlokasi di desa golo bilas kecamatan komodo kabupaten manggarai barat dengan judul peran bpd dalam musyawarah embangunan Desa y

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Peran

1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran adalah aspek dinamis kedudukan atau (status), apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dengan menjalankan suatu peranan. Sedangkan status ialah sekumpulan hak serta kewajiban yang dimiliki seseorang jika seorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga bisa dirumuskan menjadi suatu rangkaian sikap tertentu yang di timbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seorang juga mempengaruhi bagaimana fungsi itu harus dijalankan atau diperankan. Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

2. Fungsi Peran

Menurut J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) dapat membina seseorang dalam berperilaku, karena tupoksi sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, Nilai-nilai, Norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.

4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

3. Syarat-syarat Peran

Syarat-syarat Peran Soerjino Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal yaitu:

1. Peran mencakup norma-norma yg di hubungkan dengan posisi atau kawasan seseorang dalam masyarakat, peranan pada arti ini ialah rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang pada kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran ialah suatu konsep sikap yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat di katakan sebagai sikap individu, yg penting bagi struktur sosial masyarakat.

4. Jenis-Jenis Peran

Menurut Soerjono Soekanto adapun Jenis-jenis Peran Adalah Sebagai Berikut :

1. Peran aktif, peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakan pada suatu organisasi.
2. Peran partisipatif, peran partisipatif adalah peran yang di lakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
3. Peran pasif, adalah peran yang bersifat menerima saja.

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku yang di harapkan oleh semua orang atau kelompok

orang terhadap seseorang yang memiliki kedudukan tertentu. Berdasarkan pengertian di atas apabila dikaitkan dengan peran BPD, peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu. Melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti perannya dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa harus dijalankan dengan baik sesuai fungsi dengan kedudukannya.

2.2.2 Ruang Lingkup BPD

1. Pengertian BPD

BPD merupakan badan yang membuat kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan desa. Anggota BPD dipilih rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri. BPD adalah organisasi yang terkait dengan Tata pemerintahan di Desa. Hal ini sinkron dengan kemajuan serta perkembangan demokrasi dan dalam rangka menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat sebagai sarana serta wadah berdemokrasi di lingkup desa (Hanif Nurcholis, 2005:140).

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD merupakan lembaga legislative dalam struktur pemerintahan Desa.

Dalam pemerintahan Desa, BPD termasuk salahsatu unsur yang di harapkan bisa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

2. Fungsi BPD

BPD sangat di harapkan oleh masyarakat Desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota BPD harus mampu mewakili masing-masing daerah yang memilihnya. Sebagaimana Termuat dalam Pasal 31 PERMENDAGRI 110 Tahun 2016, BPD Memiliki Fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

3. Tugas-tugas BPD

Pasal 32 PERMENDAGRI 110 Tahun 2016 meyakataka Tugas BPD Adalah Sebagai Berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa

- h. menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antara waktu.
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa.
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Hak BPD

PERMENDAGRI 110 Tahun 2016 BPD (BPD) memiliki Hak Sebagai Berikut :

- a. Hak BPD
 1. Mengawasi dan Meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa
 2. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Hak anggota BPD
 1. Mengajukan usul rancangan peraturan Desa
 2. Mengusulkan pertanyaan
 3. Menyampaikan usul dan pendapat
 4. Memilih dan di pilih

5. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan belanja Desa.

5. Tujuan BPD

Secara Umum didirikan BPD memiliki beberapa Tujuan antara lain yaitu:

1. Memberikan pedoman kepada masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan kedudukannya menghadapi problem dalam masyarakat yang menyangkut kebutuhan masyarakat.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.
4. Sebagai sarana demokrasi desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan.

2.2.3 Desa

1. Pengertian Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai adat istiadat setempat, hidup bergotong royong dan mempunyai tata cara tersendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Sebagian besar mata pencahariannya ialah petani atau nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani sawah maupun kebun sedangkan pada desa

pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan (Nurcholis,2011:2).

Adapun berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

2. Ciri-ciri Desa

Adapun ciri-ciri Desa Menurut (Nurcholis,2011:2) adalah sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat sangat erat dengan alam
2. Struktur perekonomian bersifat agraris
3. Desa merupakan satu kesatuan sosial dan kesatuan kerja
4. Pertanian yang sangat tergantung pada alam.
5. Di desa norma agama dan hukum adat masih kuat.
6. Masyarakat desa memiliki solidaritas yang sngat kuat

3. Unsur-unsur Desa

Berikut Unsur-unsur Desa menurut (Nurcholis 2011:8) sebagai berikut:

1. Wilayah, meliputi tanah, letak, luas, batas, bentuk, dan topografi
2. Penduduk, meliputi jumlah, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian.

3. Tata kehidupan, meliputi sifat gotong royong, adat istiadat, tradisi, aturan dan norma (hukum informal)

4. Otonomi Desa

Talaziduhu Ndroha dalam Buku Hanif Nurcholis (2011:19) mendefinisikan Desa yang otonom ialah desa yang merupakan subjek hukum, yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan tersebut diantaranya :

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya.
2. Menjalankan pemerintahan Desa
3. Memilih kepala Desa
4. Mempunyai harta benda dan kekayaan sendiri
5. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri
6. Memiliki tanah air sendiri
7. Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan Dan Pengeluaran Keuangan Desa)
8. Menyelenggarakan gotong- royong
9. Menyelenggarakan peradilan Desa
10. Menyelenggarakan urusan lain demi kesejahteraan masyarakat Desa

5. Keuangan Desa

Hanif Nurcholis (2018:8) keuangan desa merupakan seluruh kehendak dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa

ya dapat dinilai dengan uang, termasuk juga segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli Desa, APBD dan APBN.

(PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 Passal 1) Keuangan Desa merupakan kewajiban serta hak Desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Sumber pendapatan Desa berasal dari:

1. Pendapatan asli desa berasal dari usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong dan lain-lain hasil pendapatan Desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukan bagi Desa
3. Bagian dari dana pembangunan keuanganpusat dan daerah diterima kabupaten/kota untuk paling sedikit 10% yang bagi ke setiap desa secara proposiaonal yang merupakan alokasi dana desa
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketika yang mengikat

6. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PNRI No 72 Tahun 2005 Tentang Desa). Penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya.

Berikut Beberapa fungsi Pemerintahan Desa :

1. Menyelenggarakan rumah tangga Desa
2. Melaksanaakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
3. Melaksanaakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong
4. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan
6. Melaksanakan pembinaan perekonomian Desa

Selain itu, Pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan Desa yang terdiri atas:

1. Unsur pimpinan yaitu Kepala Desa
2. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas:

- a) Sekretaris Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang di ketahui oleh sekretaris Desa.
- b) Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan unsur teknis lapangan seperti unsur pengairan, keagamaan dan lain-lain.
- c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala Desa dan wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

2.2.4 Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan.

Indonesia adalah Negara berkembang dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu upaya segenap sumber daya yang di lakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan, dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik (Effendi, 2002:2).

Tujuan utama dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beragam-beragam usaha dari berbagai sector terus berkembang dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Di samping itu bamyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam

mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat.

Supaya pembangunan itu berhasil maka di perlukan adanya dukungan, perhatian, dan partisipasi dalam segala hal. Dalam hal ini tidak terkecuali masyarakat pedesaan. Pembangunan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan warga desa misalnya pembangunan jalan dan gotong royong.

2. Faktor-faktor Pembangunan

Dwijowijoto (2003:296) menginventarisasikan faktor-faktor kunci bagi pembangunan yang mneyebabkan keberhasilan maupun kegagalan, yaitu :

a. Faktor Kepemimpinan

Kepemimpinan menjadi faktor pertama keberhasilan pembangunan karena kepemimpinan meletakkan visi dan misi dari pembangunan. Pada setiap organisasi, pemimpin mempunyai tugas mengkreasikan nilai kepada organisasi.

b. Faktor manajemen

Manajemen membuat organisasi berfungsi secara optimal. Dari konsep besarnya, manajemen merupakan urutan pekerjaan yang metodologis, sekuensial, dan dapat di benarkan secara keilmuan. Langkah utama untuk membangun budaya manajemen adalah membangun sistem pendidikan yang sebangun dengan kebudayaan manajemen itu sendiri sejak dini.

c. Faktor Kelembagaan

Setiap Negara dan masyarakat modern dipastikan memiliki tiga jenis organisasi dimana setiap warganya terikat atau menjadi bagian dari organisasi tersebut. Organisasi tersebut adalah organisasi publik, bisnis, dan nirlaba.

d. Faktor Sistem Nilai

Semua nilai merupakan pondasi internal bagi sukses tidaknya pembangunan. Sistem nilai pertama adalah profesional. Profesional adalah sebuah sikap yang bertumpuh pada tiga hal: pemilikan pengetahuan, kemampuan untuk mentransformasikan pengetahuan menjadi keterampilan dan memiliki integritas modal.

e. Faktor kekayaan alam suatu bangsa

Suatu Negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah adalah sebuah modal yang luar biasa. Kekayaan alam bukan saja menjadi capital ekonomi, namun juga capital politik.

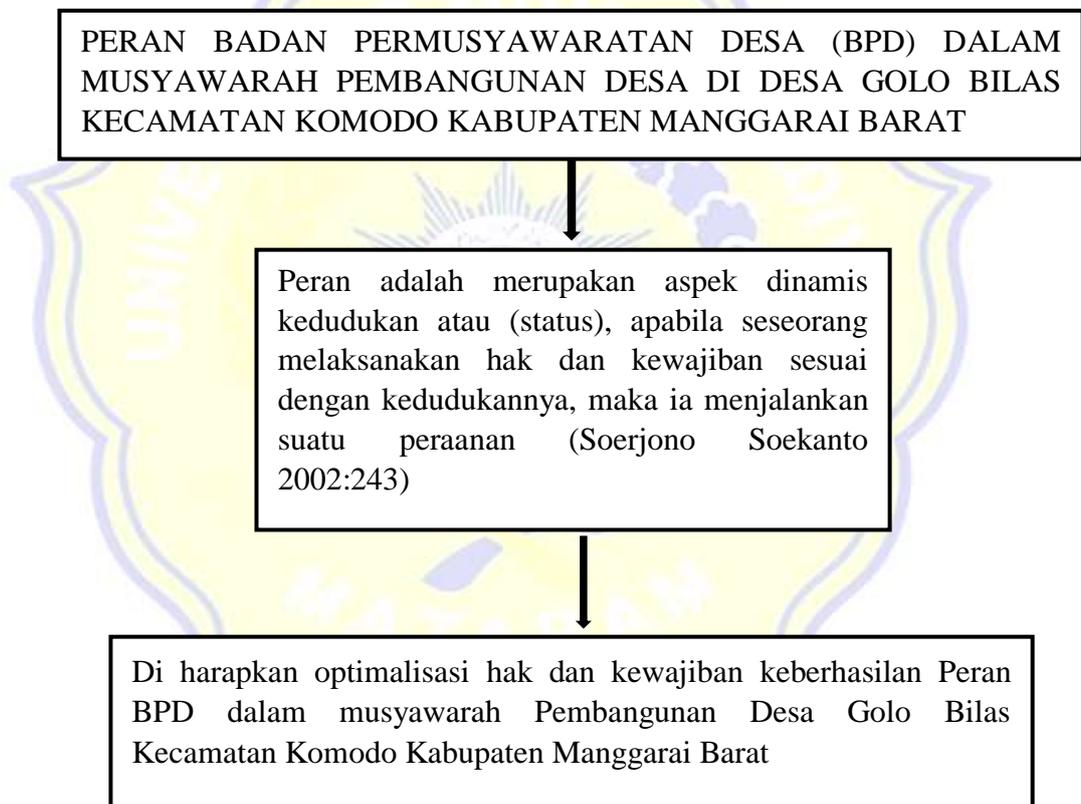
3. Tujuan Pembangunan

Khusus dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan empat pokok tujuan Pembangunan nasional mencakup:

- a. Mencerdaskan kehidupan Bangsa
- b. Menciptakan kesejahteraan umum
- c. Melindungi seluruh tumpah dara Indonesia
- d. Berperan serta dalam membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah bentuk strategi konseptual yang mengaitkan antara teori dengan berbagai faktor permasalahan yang dianggap penting untuk diselesaikan, sehingga dalam lebih mengacu pada tujuan penelitian tersebut di jalankan (Sugiyono 2014:60). penelitian ini yaitu analisis tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Musyawarah Pembangunan Desa di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat



Gambar 3.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016: 9) metode deskriptif penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *Postpositivisme I* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data di lakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang Individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. waktu pelaksanaan penelitian di rencanakan pada bulan januari sampai Maret 2022.

3.3 Teknik Pemilihan Informen dan Responden

Informan adalah orang yang di anggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang diteliti dan bersedia memberikan informan kepada peneliti, sebagai individu yang sangat penting informan merupakan tumpuan pengumpulan data bagi peneliti dalam menngungkapkan permasalahan penelitian, (Arikunto, 2010:188).

Adapun pengumpulan informen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa golo bilas
2. Ketua BPD desa golo bilas
3. Anggota badan permusyawaratan desa golo bilas
4. Anggota masyarakat desa golo bilas

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengepul data. Dalam penulisan ini di peroleh data yang di amati secara langsung di Desa Golo Bilas adalah hasil data yang di ambil dengan cara wawancara kepada informan yaitu kepada kepala desa dan ketua BPD Serta tokoh masyarakat untuk mendapatkan data tentang Peran BPD di Desa Golo Bilas.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengepul data. Dokumen, surat kabar, majalah dan lainnya. Data ini

di peroleh secara tidak langsung melalui media, dan keterangan lain yang berhubungan dengan BPD desa golo bilas seperti sejarah BPD Desa Golo bilas, dan refrensi mengenai peran BPD Desa Golo Bilas.

Data yang diperoleh dari arsip atau dokumen-dokumen yang telah dimiliki BPD desa Golo Bilas meliputi:

- a. Profil desa
- b. Data-data yang berhubungan dengan Badan permusyawaratan Desa (BPD)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Moleong (2016: 186) wawancara adalah perihal bercakap-cakap dengan maksud tertentu dengan adanya hal yang di tulis. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara di sini di lakukan dengan Tanya jawab kepada kepala desa, ketua BPD dan tokoh masyarakat, tujuan wawancara ini di lakukan untuk memperoleh data atau informasi secara mendalam mengenai Peran BPD di Desa Golo Bilas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peran nya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang di perlukan dalam permasalahan penelitian lalu di telaah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara akan lebih

kredibel atau dapat di percaya jika di dukung oleh dokumen yang terkait dengan focus penelitian (Satori,2009:148) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumentasi yang di lakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil gambar berupa foto, dan merekam hasil wawancara dengan informan terkait dengan video dan audio.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengolahan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain. dalam hal ini observasi di lakukan dengan mengamati secara lansung tentang peran BPD di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan aktifitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu di catat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal penting, lalu di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah diReduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila di perlukan. Reduksi data di bantu dengan

peralatan elektronik seperti Komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie card, Pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Di sarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network(jejaring kerja) chart.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketigatan dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Menurut sugiyono (2016:253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual, atau intraktif, hipotesis atau teori.